OPTIMALISASI PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Fanny Franisca Lase
32.0187
Asdaf Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
Program Studi Keuangan Publik
Email: 32.0187@praja.ipdn.ac.id
Pembimbing Skripsi: Anindita Primastuti, SE, ME

ABSTRACT

Problem/Background (Research Gap): This study describes the role of SIMPATDA (Regional Revenue Management Information System) in optimizing local taxes in Tanjung Jabung Timur Regency, identifies the inhibiting factors in local tax optimization, and evaluates the efforts made by the local government to increase regional revenue through the taxation sector. **Objective:** The aim of this research is to understand and analyze the role of SIMPATDA in the optimization of local taxes in Tanjung Jabung Timur Regency. **Method:**This research employs a descriptive qualitative method. Data collection techniques include interviews and documentation, analyzed using the Miles and Huberman data analysis model, which involves Data Collection, Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing. The theoretical framework used is Firdausy's (2018) theory on Tax Optimization. **Results/Findings:**SIMPATDA plays a role in the intensification of local tax optimization by maximizing taxpayer contributions. The use of a more comprehensive system can accelerate tax management through the classification of tax types using tax codes and administrative structures aligned with regulations. However, the system faces constraints such as limited human resources, the need for staff skill enhancement through training, and the need for direct outreach to taxpayers. Inhibiting factors include low taxpayer awareness, limited infrastructure, and inefficient administrative systems for local tax management and collection. Efforts made by the local government include taxpayer outreach, employee training, direct visits to taxpayers (proactive approach), and enhancing digital tax payment systems. **Conclusion:**The SIMPATDA application has not yet optimally increased regional revenue because it is not accessible to taxpayers and payments are still made manually in cash.
Keywords: Information System ,Optimization, Public Finance, Regional Revenue

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): mendeskripsikan peran SIMPATDA dalam optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah, serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan.**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis peran SIMPATDA dalam optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan Dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari teknik Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Landasan teori yang digunakan yaitu Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah Firdausy (2018).

Hasil/Temuan: SIMPATDA berperan dalam intensifikasi optimalisasi pajak daerah dengan memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak, Penggunaan sistem yang lebih komprehensif dapat mempercepat proses pengelolaan pajak melalui penggunaan kode pajak untuk mengelompokkan jenis pajak, struktur administrasi yang dirancang sesuai regulasi akan tetapi memiliki kendala kurangnya tenaga kerja, peningkatan skill staf dengan pelatihan serta sosialisasi langsung ke wajib pajak. Faktor Penghambat dalam mengoptimalkan pajak yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, keterbatasan infrastruktur serta Sistem Administrasi Kurang Efisien dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu sosialisasi kepada wajib pajak, pelatihan kepada pegawai, datang langsung kepada wajib pajak(jemput bola), meningkatkan pembayaran pajak berbasis digital. **Kesimpulan:** Aplikasi SIMPATDA belum optimal meningkatkan pendapatan daerah karena belum bisa diakses wajib pajak dan pembayaran masih dilakukan secara tunai.

Kata Kunci : Keuangan Publik , Optimalisasi, Pendapatan Daerah, Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah adalah institusi yang memiliki otoritas dalam menjalankan pelayanan publik dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sipil bagi setiap warga yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, agar masyarakat dapat memperoleh layanan tersebut ketika diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Taliziduhu Ndraha, 2005). Otonomi daerah yang diberikan kepada suatu daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelola, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan 32 urusan pemerintahan konkuren dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam mengimplementasikan otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan berbagai sumber daya, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta pedoman atau metode yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber daya keuangan yang memiliki peran strategis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sinurat (2017) Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota diseluruh Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah, PAD memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal, memperkuat kapasitas pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Utari Handayani & NR, 2020) . Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat wajib mendistribusikan dana secara adil guna mendukung prioritas pembangunan daerah, namun juga mendorong daerah untuk mengoptimalkan potensi lokalnya. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) memiliki peran dominan dalam pendanaan pelayanan publik di daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Keterlibatan pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan perpajakan juga memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi daerah(Yossinomita et al., 2025). Informasi administrasi pajak yang akurat dan regulasi keuangan yang ketat

merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang modern, di mana keduanya saling berinteraksi secara kompleks untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. (Hongyan Wang et al., 2025). Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena PAD yang dihasilkan belum mencukupi. Kemandirian daerah tidak terlepas dari seberapa besar daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerahnya, serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah(Riswati, 2022). Salah satu contohnya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dari 11 kabupaten/kota yang ada, daerah ini mencatat PAD terendah pada tahun 2023 sebesar Rp58,44 miliar, menurun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kabupaten lain seperti Bungo dan Muaro Jambi mencatat dana transfer lebih dari Rp1 triliun. Ketergantungan pada dana pusat ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan PAD sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal. Dalam periode 2019–2023, PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi dan menunjukkan tren ketidakstabilan. Pendapatan dari sektor pajak daerah naik turun, sedangkan retribusi daerah justru terus menurun. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal.Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis untuk menggali dan mengelola potensi PAD secara lebih efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi menjadi pendekatan penting dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam hal keuangan daerah. Menurut Turmuji (2022) optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam pengelolaan pajak daerah. Menurut Wihatmono (2025) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Sistem Informasi Keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) sejak tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Namun, penerapan SIMPATDA masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan keamanan jaringan, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur, dan keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah terpencil. Hambatan-hambatan ini berdampak pada efektivitas sistem dalam meningkatkan penerimaan PAD.Meskipun SIMPATDA telah berjalan lebih dari lima tahun, kajian akademik yang secara khusus mengevaluasi dampak dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat terbatas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan hartanto hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat dalam pemungutan PKB adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti implementasi teknis tanpa mengaitkan secara langsung dengan kinerja fiskal daerah(Hartanto & Sugiharti, 2019). Selain itu, belum banyak studi yang membandingkan efektivitas sistem ini antara daerah dengan tingkat PAD tinggi dan rendah, sehingga belum diketahui secara jelas sejauh mana teknologi informasi benar-benar membantu daerah seperti Tanjung Jabung Timur dalam mencapai kemandirian fiskal. Dengan mempertimbangkan ketergantungan PAD yang masih rendah, penerapan SIMPATDA yang belum optimal, dan terbatasnya kajian tentang efektivitas sistem ini dalam konteks daerah dengan tantangan fiskal, maka penelitian ini menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dapat berkontribusi terhadap optimalisasi PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah secara digital.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah yang diangkat dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kontribusi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan salah satu daerah dengan PAD terendah di Provinsi Jambi. Meskipun SIMPATDA telah diterapkan sejak tahun 2018 sebagai upaya digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi lokal. Selain itu, masih minim kajian akademik yang menilai efektivitas SIMPATDA dalam meningkatkan kinerja fiskal, khususnya di daerah dengan tantangan ekonomi tinggi. Sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada aspek teknis atau administratif, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan capaian PAD atau membandingkan efektivitas sistem antarwilayah. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara tujuan implementasi SIMPATDA sebagai alat peningkatan PAD dengan realisasi dan dampaknya yang belum terukur secara menyeluruh, sehingga penting dilakukan penelitian untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian berjudul "Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga" yang dilakukan oleh Lerinda M. Sagala, Ilham Hidayah Napitupulu, Nurlinda. Hasil penelitian menunjukkan Upaya peningkatan PAD mencakup penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPATDA) dan teknologi Tapping Box guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai untuk memperkuat keterampilan dalam teknologi informasi. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi optimal menggunakan kekuatan dan peluang, dengan bobot tertinggi 1,44 dari interaksi IFAS dan EFAS. Hasil analisis PEST menyoroti tiga area penting: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui sosialisasi yang efektif (2) Mengadopsi teknologi informasi canggih dan memastikan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, dan (3) Memastikan stabilitas kebijakan dengan koordinasi terus-menerus dengan pemerintah pusat. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat keuangan daerah, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik(Sagala, 2024) .

Penelitian berjudul "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo" dilakukan oleh Mattoasi, Didiet Pratama Musue, dan Winrar Gita Abbas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui SIMDA Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo sebesar 57,3%, sedangkan sisanya, yaitu 42,7%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Mattoasi et al., 2023).

Harvi Dasnoer, Aldri Frinaldi, dan Asnil melakukan penelitian berjudul "Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui Smart Tax Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi Srikandi di Kabupaten Padang Utara dalam meningkatkan pelayanan administrasi surat telah berhasil(Harvi Dasnoer, 2023)

Penelitian berjudul "Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau"

yang dilakukan oleh Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi Putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat internal dan eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan PAD dapat dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang mencakup penguatan kelembagaan dan sumber daya, perbaikan administrasi, operasional, serta sistem pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu, peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan pajak daerah(Sambodo, 2020)

Penelitian berjudul ”Optimalisasi pendapatan asli daerah provinsi jawa barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal” yang dilakukan oleh Rizky Zakaria. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran krusial, mengingat potensi ekonomi Jawa Barat yang signifikan, tren penurunan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, serta dampak pandemi yang masih mempengaruhi perekonomian masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan PAD dinilai belum optimal(Rizky & Syahputra, 2022)

Penelitian berjudul “optimalisasi penerimaan pajak hiburan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah” yang dilakukan oleh Saragih, Ricky Endrie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dianggap sebagai salah satu potensi peningkatan penerimaan daerah yang cukup berpengaruh, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar dapat lebih optimal meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini penting bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak hiburan, karena efek dari kenaikan pendapatan daerah akan berpengaruh secara signifikan(Dharmasisya & Saragih, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan teoritis dan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji optimalisasi khususnya pada sektor pajak daerah. penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang lebih komprehensif, yaitu teori optimalisasi dari Firdausy (2018). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menilai kinerja pajak daerah melalui pendekatan kuantitatif berupa rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, elastisitas, dan analisis tren.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran SIMPATDA dalam optimalisasi pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengoptimalkan pajak daerah.

II METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan subjek di lapangan, dengan fokus mendalam pada dinamika dan karakteristik lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung (Wasistino sadu, 2024). Menurut Djam Satori (2011) menjelaskan bahwa, “pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah posedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan”. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek ilmiah. Peneliti menerapkan paradigma Constructivism–Interpretivism.

Paradigma ini memandang bahwa realitas adalah hasil konstruksi manusia itu sendiri(Batubara, 2017). Data adalah kumpulan datum atau sebuah jamak dari datum yang bersumber dari segala fakta empirik yang sudah diperoleh peneliti dengan maksud menemukan solusi terhadap masalah atau jawaban penelitian (Simangunsong, 2016). Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini melibatkan kegiatan seperti reduksi data (pemilihan informasi penting), penyajian data (membuat rangkuman dan visualisasi), dan penarikan kesimpulan (interpretasi dan verifikasi) sebagaimana dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017). Peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, karena individu yang ditunjuk sebagai informan merupakan pihak yang memahami serta mampu memberikan informasi dan data yang relevan dan akurat(Sugiyono, 2019). Purposive sampling sendiri merupakan metode pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya, karena individu tersebut dianggap memiliki pengetahuan paling mendalam mengenai hal yang diteliti atau memiliki posisi strategis yang dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan yang dijadikan sebagai pedoman wawancara yang akan dijawab oelh informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala bakeuda tanjung jabung timur, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Pengelola SIMPATDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta wajib pajak. Analisis data yang dilakukan berdasarkan indikator optimalisasi pajak daerah Firdausy (2018) yaitu mempertimbangkan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan personal, penggunaan sistem lebih komprehensif, kemampuan organisasi, pelatihan SDM, dan sosialisasi kepada wajib pajak. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran SIMPATDA dalam optimalisasi pajak daerah dikabupaten tanjung jabung timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran SIMPATDA dalam optimalisasi pajak daerah. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai optimalisasi pajak daerah, penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara langsung dilakukan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan didukung dengan bukti mengumpulkan foto, gambar dan dokumen lainnya yang terkait dengan optimalisasi pajak daerah melalui SIMPATDA.

3.1 Peran SIMPATDA dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Berdasarkan Teori Firdausy (2018) tentang Optimalisasi, maka optimalisasi pajak daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan strategi penting dalam optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. aplikasi SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah berperan dalam intensifikasi dalam optimalisasi pajak daerah dengan memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar, melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pengelolaan pajak, serta pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah masih menghadapi keterbatasan, mengingat belum seluruh sistem terintegrasi secara menyeluruh serta masih terdapat wajib pajak yang belum terdata dengan akurat dalam basis data pemerintah daerah.

Dari sisi kelembagaan, perlu adanya regulasi yang jelas serta struktur organisasi yang mampu beradaptasi dengan sistem digital, disertai koordinasi antar lembaga seperti Disdukcapil dan SAMSAT. Aspek ketatalaksanaan mencakup penyederhanaan prosedur, integrasi sistem, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui fitur pelaporan real-time. Sementara itu, aspek personal berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan penggunaan teknologi dan evaluasi kinerja pegawai.

Tabel 1. Target dan realisasi pajak daerah

TAHUN	TARGET PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK DAERAH	PERSENTASE(%)
2017	14.868.520.000,00	16.624.742.998,10	111,81
2018	17.453.350.000,00	17.711.538.820,42	101,48
2019	17.913.350.000,00	16.647.635.508,94	92,93
2020	17.173.312.712,50	15.859.280.136,99	92,35
2021	19.072.000.000,00	19.776.698.793,50	103,69
2022	23.314.813.984,00	23.152.323.336,80	99,3
2023	21.191.200.000,00	20.165.846.039,50	95,16
2024	22.362.280.000,00	23.459.510.447,00	104,91

Berdasarkan data realisasi pajak daerah tahun 2017 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian pajak daerah melampaui target dengan persentase masing-masing sebesar 111,81% dan 101,48%. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang signifikan, disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 serta kurang optimalnya penerapan SIMPATDA. Sejak 2021, capaian mulai menunjukkan tren positif berkat optimalisasi sistem digital tersebut. Pada tahun 2024, capaian realisasi pajak mencapai 104,91%, menunjukkan keberhasilan penerapan strategi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Secara keseluruhan, penerapan SIMPATDA dan strategi perpajakan ini menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat tantangan eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan pajak daerah ke depan.

Penggunaan sistem yang lebih komprehensif dalam pengelolaan pajak daerah mengacu pada pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mendukung seluruh aspek operasional, mulai dari pencatatan, pemungutan, pengawasan, analisis data, hingga pelayanan kepada wajib pajak. Aplikasi SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam upaya intensifikasi pendapatan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan struktur operasional yang mendukung pengelolaan pajak, retribusi, dan kekayaan daerah secara terintegrasi. meskipun pada praktiknya masih dilakukan secara tunai dan tatap muka di kantor BAKEUDA. Alur pelayanan meliputi pendaftaran wajib pajak, pendataan melalui SPTPD, penetapan pajak dengan sistem Official dan Self Assessment yang terotomatisasi, serta proses pembayaran melalui SSPD yang langsung tercatat dalam SIMPATDA. Akan tetapi, sistem ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh wajib pajak. Keterbatasan akses membuat pelayanan masih bergantung pada proses

manual, sehingga transparansi, kecepatan, dan kenyamanan layanan pajak belum optimal dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar SIMPATDA dapat digunakan secara langsung oleh wajib pajak untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah.

2. Penerapan Struktur Administrasi

Penerapan struktur administrasi pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak melalui pengelolaan yang terorganisir dan terintegrasi. Implementasi SIMPATDA membutuhkan koordinasi antar unit kerja mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak, dengan dukungan SDM yang kompeten agar proses administrasi berjalan cepat dan minim kesalahan. Saat ini, implementasi aplikasi SIMPATDA masih bersifat internal dan terbatas pada lingkungan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), sehingga belum terjalin korelasi atau integrasi sistem dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang seharusnya dapat mendukung validasi data wajib pajak secara lebih akurat dan menyeluruh. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, struktur administrasi Badan Keuangan telah disusun sesuai peraturan, dengan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab utama, didukung oleh sekretariat dan berbagai bidang fungsional seperti anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pendapatan, serta UPTD di tingkat kecamatan. Meskipun struktur ini mendukung transparansi dan efisiensi, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja untuk menangani beban kerja yang terus meningkat. Oleh karena itu, peningkatan SDM dan optimalisasi teknologi menjadi kunci dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan akuntabel.

3. Peningkatan Skill Staf

Peningkatan skill staf merupakan upaya penting untuk memastikan pegawai memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SIMPATDA memberikan dampak terhadap peningkatan skill staf dalam mengoprasionalkan aplikasi tersebut. Di Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, pelatihan dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali, melalui bimbingan teknis yang mencakup aspek teknis dan manajerial. Metode pelatihan meliputi studi banding, workshop praktis, serta evaluasi dan umpan balik guna mengukur efektivitas pelatihan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi kerja, dan kontribusi pegawai terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Sosialisasi atau Penyuluhan

Sosialisasi pajak merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak, baik melalui kunjungan ke lokasi wajib pajak maupun dengan mengundang mereka ke kantor. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga informasi dapat disampaikan secara lebih jelas dan mendalam. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan lapangan, studi banding ke instansi lain, serta workshop praktis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengelolaan perpajakan. Adanya tim khusus yang ditugaskan untuk sosialisasi menunjukkan bahwa upaya ini telah dilakukan secara terencana dan optimal, serta berkontribusi nyata pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah.

3.2 Faktor Penghambat bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengoptimalkan pajak

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Optimalisasi pajak merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pajak adalah rendahnya tingkat kesadaran perpajakan, yang umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga kewajiban perpajakan sering kali diabaikan.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penurunan penerimaan pajak dari sektor sarang burung walet disebabkan oleh penurunan harga pasar dan terbatasnya ketersediaan bibit, yang berdampak pada produktivitas dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap besaran tarif pajak yang tinggi dan perubahan tarif yang tidak konsisten turut menimbulkan beban psikologis dan finansial, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Fenomena ini selaras dengan teori perilaku ekonomi, yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan akan meningkat apabila beban pajak masih berada dalam rentang kemampuan ekonomi wajib pajak. Ketika beban pajak melebihi daya beli, tingkat kepatuhan cenderung menurun. Selain itu, minimnya literasi perpajakan juga menjadi hambatan signifikan. Kurangnya pemahaman mengenai jenis pajak, mekanisme perhitungan, serta manfaat dari pembayaran pajak menyebabkan masyarakat cenderung abai atau bahkan enggan memenuhi kewajiban fiskalnya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan menjadi hal yang sangat krusial.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting dalam optimalisasi pemungutan pajak. Meskipun struktur administrasi telah dirancang untuk mendukung efisiensi, keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil, menjadi hambatan signifikan. Jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan lokasi pemungutan pajak serta akses jalan yang rusak atau tidak memadai menghambat mobilitas petugas pajak, sehingga proses pengawasan dan penagihan menjadi kurang efektif. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak di daerah terpencil tidak termanfaatkan secara optimal dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak akibat kesulitan dalam melakukan pembayaran atau pelaporan tepat waktu. Hambatan infrastruktur juga menciptakan kesenjangan akses layanan perpajakan antara wilayah yang mudah dijangkau dan daerah terpencil, sehingga perlu perhatian khusus dalam pengembangan fasilitas transportasi untuk mendukung optimalisasi pajak daerah.

3. Sistem Administrasi Kurang Efisien

Penerapan aplikasi SIMPATDA dalam administrasi pajak daerah menghadapi kendala signifikan terkait dominasi pembayaran pajak secara tunai. Meskipun aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, ketergantungan pada pembayaran tunai menghambat optimalisasi fungsi teknologi informasi. Metode tunai tidak hanya berisiko terhadap kriminalitas, tetapi juga memerlukan waktu lebih lama akibat proses manual dalam penghitungan, penyimpanan, dan pencatatan transaksi, sehingga menghambat kecepatan pelaporan dan pemrosesan data. Selain itu, rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet, menjadi faktor penghambat adopsi metode pembayaran non-tunai oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dan penerimaan teknologi pembayaran modern guna mendukung efektivitas sistem SIMPATDA dan optimalisasi administrasi perpajakan daerah.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Dalam rangka mengatasi hambatan optimalisasi pajak daerah melalui aplikasi SIMPATDA, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, dilakukan penyuluhan dan bimbingan teknis secara langsung kepada wajib pajak, termasuk sosialisasi door-to-door dan pelatihan bagi pelaku usaha, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan. Upaya ini didukung oleh pembentukan tim khusus yang menyampaikan materi edukatif secara personal.

Kedua, penerapan strategi jemput bola dengan mendatangi wajib pajak di rumah, usaha, dan instansi terkait untuk memudahkan proses pemungutan dan meningkatkan kepatuhan, khususnya di daerah dengan akses terbatas. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Ketiga, penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital melalui aplikasi SIMPATDA yang terus dikembangkan, serta integrasi dengan sistem Cash Management System (CMS) bekerja sama dengan Bank 9 Jambi. Inovasi ini mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran non-tunai, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan studi banding menjadi fokus untuk memperkuat kompetensi pegawai dalam mengelola pajak daerah. Dengan berbagai langkah tersebut, Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur berupaya meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, mendukung pembangunan daerah, dan mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa strategi intensifikasi pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SIMPATDA untuk memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Namun, ekstensifikasi masih menghadapi kendala karena belum seluruh sistem pengelolaan pajak terintegrasi, dan pendataan wajib pajak belum sepenuhnya akurat. Berbeda dengan penelitian Sambodo (2020)yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan sistem secara menyeluruh, serta Sagala (2024) yang menyoroti efektivitas SIMPATDA dan tapping box dalam efisiensi pemungutan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada persoalan implementasi di lapangan, seperti terbatasnya akses wajib pajak terhadap sistem digital dan masih dominannya proses manual dalam pelayanan pajak daerah.

struktur administrasi pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pelaksanaannya masih bersifat internal dan belum terintegrasi secara efektif antar instansi terkait. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Sagala (2024)yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem teknologi pajak, serta dengan Sambodo (2020)yang menyoroti perlunya reformasi sistem administrasi dan penguatan kelembagaan. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menunjukkan secara lebih rinci keterbatasan tenaga kerja dan kurangnya integrasi sistem antar instansi pendukung, aspek yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi sebelumnya.

Penelitian ini menemukan bahwa pelatihan staf di Badan Keuangan Daerah dilakukan secara rutin setahun sekali dalam bentuk bimbingan teknis, namun cakupan dan frekuensinya masih terbatas. Hal ini sejalan dengan Sagala (2024)yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan sebagai strategi peningkatan kompetensi, meskipun fokusnya lebih pada penguasaan teknologi informasi. Perbedaan utama penelitian ini adalah pada penyajian metode pelatihan yang digunakan serta evaluasi pelatihan secara lebih rinci, sehingga memberikan gambaran lebih mendalam tentang implementasi pengembangan SDM di lapangan.
Upaya sosialisasi pajak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan dengan pendekatan langsung dan interaktif melalui kunjungan lapangan dan workshop, yang dikelola oleh tim khusus. Temuan ini mendukung rekomendasi Sagala (2024)yang menyoroti pentingnya sosialisasi pajak sebagai bagian dari analisis PEST. Berbeda dengan Harvi Dasnoer (2023) yang lebih menyinggung inovasi pelayanan tanpa membahas sosialisasi secara eksplisit, penelitian ini menunjukkan adanya sistematisasi pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan tim khusus, yang belum banyak dijabarkan dalam studi sebelumnya.

Data capaian realisasi pajak daerah menunjukkan fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2024, dengan tren menurun saat pandemi COVID-19 dan peningkatan kembali setelah optimalisasi digitalisasi melalui SIMPATDA. Pada tahun 2024, capaian mencapai 104,91%, mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini berbeda dari hasil Rizky & Syahputra (2022) yang mengamati tren penurunan kontribusi PAD di Jawa Barat dan menyimpulkan bahwa strategi perpajakan belum optimal. Penelitian ini memberikan bukti kuantitatif dan waktu nyata bahwa digitalisasi telah berperan positif meskipun belum sepenuhnya menyeluruh.

Pemanfaatan SIMPATDA sebagai alat intensifikasi pajak sudah berjalan, namun akses langsung oleh wajib pajak masih terbatas dan sebagian besar proses pemungutan masih dilakukan secara manual di kantor Badan Keuangan Daerah.Mattoasi (2023) menegaskan pengaruh signifikan penggunaan SIMDA terhadap laporan keuangan, dan Sagala (2024)juga mengapresiasi SIMPATDA dan tapping box sebagai alat efisiensi pemungutan. Namun, penelitian ini menyoroti hambatan implementasi di lapangan, terutama terkait akses sistem dan penggunaan teknologi yang belum optimal, sehingga efektivitas SIMPATDA sangat bergantung pada perbaikan pelaksanaan operasional dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai optimalisasi pajak daerah melalui SIMPATDA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat disimpulkan bahwa SIMPATDA memiliki peran penting dalam intensifikasi optimalisasi pajak daerah dengan memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Sistem yang komprehensif ini mempercepat proses pengelolaan pajak melalui penggunaan kode pajak untuk mengelompokkan jenis pajak, serta didukung oleh struktur administrasi yang telah disesuaikan dengan regulasi. Namun, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga kerja serta kebutuhan peningkatan keterampilan staf melalui pelatihan dan sosialisasi langsung kepada wajib pajak. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat dalam optimalisasi pajak, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, keterbatasan infrastruktur terutama akses jalan yang buruk, serta sistem administrasi yang kurang efisien dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan berbagai upaya, antara lain sosialisasi kepada wajib pajak, pelatihan bagi pegawai, pendekatan jemput bola dengan

mendatangi langsung wajib pajak, serta peningkatan penggunaan sistem pembayaran pajak berbasis digital guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, *3*(2), 95. https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099

Dharmasisya, & Saragih, R. E. (2022). Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(December), 37.

Djam Satori, A. K. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Firdausy.C. (2018). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795355249664.

Hartanto, G. S., & Sugiharti, D. K. (2019). The Impact of the Motor Vehicle Tax Award on the Increase of the West Java Province's Locally Generated Revenue. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 168–189. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a9

Harvi Dasnoer. (2023). *Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui Smart Tax Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang (Harvi Dasnoer dkk 2023)*. *2*(23), 349–365.

Hongyan Wang, B, J. C. a, & A, H. Z. (2025). *Tax administration informatization, financial tightened regulation, and firm productivity: A quasi-natural experiment based on the "Golden Tax Phase III project." 98*. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104003

Mattoasi, M., Musue, D. P., & Abas, W. G. (2023). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Pendapatan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, *2*(1), 1–7. https://doi.org/10.31289/jbi.v2i1.1696

Riswati. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, *9*(1), 12–22.

Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(1), 47–59. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545

Sagala, L. M. (2024). *Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga*. *7*.

Sambodo, B. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *10*(1), 205–210. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sinurat, M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahmat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

Taliziduhu Ndraha. (2005). *Kybernologi : sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*. Rineka Cipta. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29853

Turmuji, H. F., Mubarok, & Engkus. (2022). Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(11), 3773–3785. https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1420/1110

Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216

Wasistino sadu, ika sartika, F. R. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (MPIP)*. Bumi Askara.

Wihatmono, S. R., Suharman, H., & Daryanto. (2025). The Influence of Organizational Culture on the Government Internal Control System and its Impact on the Quality of Financial Information Systems in the Regional Revenue Agency of West Java Province. *Journal of Ecohumanism*, *4*(1), 2140–2155. https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6004

Yossinomita, Y., Effiyaldi, Feranika, A., Mardiana, R., Hassandi, I., Pangestu, M. G., & Fahdillah, Y. (2025). Analysis of Optimal Tax Ratio and Efficiency of Regional Tax Revenue: A Case Study of Provinces in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, *11*(1), 74–99. https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.193